

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN PERENCANA KEUANGAN

Khalif Akmal

ABSTRAK

Transaksi jual beli baik jasa saat ini cukup berkembang dan menyebabkan adanya suatu antara konsumen dan pelaku usaha yang didukung oleh kemajuan teknologi. Dewasa ini, profesi perencana keuangan banyak diminati oleh masyarakat untuk menentukan tujuan dan prioritas keuangannya. Harapan mendapat keuntungan berubah menjadi kerugian bagi para pengguna jasanya terlebih belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur mengenai kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan sanksi bagi perencana keuangan termasuk tidak adanya pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan tidak bergerak dalam bidang keuangan. Tetapi pada kenyataannya, perencana keuangan sangat berkaitan erat dengan sektor keuangan. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan tidak lain menelaah terkait dengan upaya perlindungan hukum bagi konsumen perencana keuangan dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen perencana keuangan bila mengalami kerugian dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyedia jasa tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya perlindungan hukum bagi konsumen perusahaan perencana keuangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta aturan yang mendukung lainnya. Adanya celah hukum menyebabkan pelaku usaha bisa berbuat sewenang-wenang. Kerugian yang dialami konsumen bisa dilakukan upaya hukum baik melalui jalur litigasi dan non-litigasi. BPSK sebagai salah satu lembaga yang memiliki posisi signifikan dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian jalur non-litigasi lebih diutamakan dalam permasalahan ini. Sehingga dalam hal diperlukan adanya aturan hukum yang jelas terkait dengan perusahaan perencana keuangan agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perusahaan Perencana Keuangan; Konsumen; Perlindungan Hukum.

LEGAL PROTECTION EFFORTS FOR CONSUMER FINANCIAL PLANNING COMPANIES

Khalif Akmal

ABSTRACT

Good service buying and selling transactions are currently developed enough to create a close relationship between consumers and business actors supported by technological advances. Today, the profession of financial planner is much in demand by the public to determine its financial goals and priorities. The expectation of profit turns into a loss for its service users, especially the absence of rules that specifically regulate the authority, obligations, responsibilities and sanctions for financial planners including the absence of supervision carried out by the Financial Services Authority because it is not engaged in finance. But in reality, financial planners are very closely related to the financial sector. The purpose of this study is none other than to analyze related legal protection efforts for consumer financial planners and legal efforts that can be made by consumer financial planners when experiencing losses from arbitrary actions taken by such service providers. The research methods used in this writing are normative juridical with a statute approach and use secondary data. The results showed that legal protection for consumer financial planning companies is based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and other supportive rules. The existence of legal loopholes causes business actors to be arbitrary. Losses experienced by consumers can be made legal efforts both through litigation and non-litigation channels. BPSK is one of the institutions that has an important role in resolving disputes between consumers and business actors through non-litigation channels. Non-litigation resolution takes precedence in this matter. So that in the event of a clear rule of law related to financial planning companies in order to create legal certainty and protection.

Keywords: Financial Planning Company; Consumers; Protection of the Law.